

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Paradiplomasi secara relatif merupakan fenomena baru bagi aktivitas pemerintahan di Indonesia. Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas ‘*sub-state*’, atau pemerintah regional/pemda, dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik (Mukti, 2013).

Saat ini pemerintah regional atau pemda dapat melakukan kerja sama Internasional. Fenomena ini merupakan hasil perkembangan aktor dalam lingkup Hubungan Internasional yang saat ini sangat gencar dilakukan Indonesia. Banyak Pemerintah Regional yang berkepentingan ingin memajukan daerahnya melakukan kerja sama, salah satunya Pemerintah Kota Jambi. Penelitian tentang kerja sama antara Pemerintah Kota Jambi dengan *United Nations Economic of Social and Commision for Asia and Pacific* difokuskan pada kerja sama dalam pengelolaan sampah yang ada di Kota Jambi. Isu lingkungan akan selalu penting dan perlu dibahas agar masa depan Indonesia dapat menjadi negara yang peduli terhadap lingkungan dan bebas sampah.

Produksi sampah di Kota Jambi adalah 362,5 ton sampah per hari, dengan limbah rata-rata per ibukota 0,53 kg / kapita / hari. Umumnya, sistem pengelolaan sampah menerapkan metode konvensional yang mengandalkan pada pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan limbah. Di sisi lain, pengenalan fasilitas pengolahan limbah sebagai inisiatif juga partisipatif di tingkat masyarakat baru mulai berkembang di kota. Di Kota Jambi, dua otoritas lokal yang

menjadi kunci yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan limbah terkait adalah Badan Lingkungan Hidup atau Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan *Cleansing City* (Sanitasi, *Landscaping*, Dinas Pertamanan dan Pemakaman) atau Dinas Kebersihan, Pertamanan Dan Pemakaman (DKPP), (Arsip Resmi Baseline Survey, UNESCAP).

Seperti halnya di provinsi lain di Indonesia, semua rencana alokasi anggaran yaitu belanja dan pendapatan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Salah satu item dalam APBD adalah belanja langsung untuk program pengembangan pengelolaan sampah. Program-program ini mencakup lokakarya untuk pengembangan kebijakan pengelolaan sampah; pengadaan alat bantu dan peralatan untuk penanganan limbah; pengembangan teknologi pengelolaan sampah; peningkatan program keterlibatan masyarakat; perbaikan operasional dan pemeliharaan alat dan peralatan pendukung; dan perbaikan operasional dan pemeliharaan TPA.

Total alokasi anggaran pemerintah daerah untuk pengelolaan sampah meliputi gaji untuk karyawan tetap dan kontrak, pengeluaran untuk layanan dan produk (termasuk layanan komputer, perjalanan bisnis operasional dan pemeliharaan kendaraan, biaya administrasi), dan pengeluaran modal / investasi seperti alat-alat dan bangunan. Pada 2013, total anggaran untuk pengelolaan sampah di otoritas lokal mencapai 1,05 persen, setara dengan Rp 12.108.992.400. Dari total belanja daerah pada tahun 2013, jumlah yang dialokasikan Rp. 1.151.565.666.248.19 Jumlah Rp 155.547.600 dialokasikan untuk BLH dan Rp 11.953.374.800 dialokasikan untuk DKPP. Proyeksi kota untuk belanja langsung pada tahun 2015 adalah dari Rp 33.103.840.804. Silahkan lihat Tabel untuk rincian lebih lanjut tentang ini (Arsip Resmi Baseline Survey, UNESCAP).

**Tabel 1.1 Alokasi Anggaran lokal Otoritas Pengelolaan Sampah di Kota Jambi**

No	Institution	Budget Allocation For Waste Management Program	Proportion to Regional Expenditure
		2013 (IDR)	
1	Environmental Agency	155.547.600,00	1,05 %
2	City Cleansing Agency (Sanitation, Landscaping, and Cemetery Agency)	11.953.374.800,00	
Total Expenditure		12.108.992.400,00	
Total Regional Expenditure		1.151.565.666.248,19	

Sumber : *Baseline Survey* UNESCAP

Berdasarkan data di atas, dana operasional Pemerintah Kota yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah cukup besar, dengan dilakukannya paradiplomasi tersebut tentunya diharapkan bisa menghemat APBD dan menimbulkan inovasi baru bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dari pengelolaan sampah.

Usaha pemerintah kota Jambi mengenai pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan sangat banyak, diataranya melalui program Bangkit Berdaya, Kampung Bantar, Kampung Iklim, Kampung Flory, Kampung Toga, Kampung Hidroponik, membangun Taman-taman Kota, kewajiban Pengembang menyediakan 45% area perumahan untuk RTH, fasos dan fasum, kewajiban pemilik ruko bertingkat menanam pohon sejumlah tingkatannya, kewajiban menanam pohon bagi calon mempelai yang akan menikah. Semua kegiatan ini merupakan wujud kepedulian pemerintah akan pentingnya masalah lingkungan yang ada. (Bagian Kerjasama Kota Jambi, 2018)

Pemerintah kota Jambi, di bawah kepemimpinan Wali Kota H. Syarif Fasha sangat berkomitmen dalam menjaga lingkungan Kota

Jambi bersih dan sehat dibuktikan dengan berhasil diraihinya anugerah Adipura 5 kali berturut-turut sebagai salah satu indikator dan tolak ukur dalam membangun lingkungan hidup berkelanjutan di Kota Jambi. Bersamaan dengan diraihinya Adipura tahun 2017 itu, Pemkot Jambi juga terpilih sebagai penerima penghargaan Taman Kota Terbaik Nasional. Pengakuan lainnya yang sebelumnya juga telah di berikan oleh Pemerintah Pusat adalah Penghargaan Program Langit Biru Terbaik I tahun 2016. Atas prestasinya itu, Kota Jambi, juga mendapat apresiasi dengan diberikannya bantuan AQMS (alat ukur kualitas udara) dari pemerintah pusat di tahun yang sama (Info Jambi, 2017).

Saat ini, eksistensi Kota Jambi dalam kancah internasional tidak perlu diragukan lagi. Sebagai daerah yang memiliki konsep *outward looking policy* dalam visi pembangunannya, Kota Jambi tercatat sebagai salah satu daerah di Indonesia yang aktif dan memiliki hubungan kemitraan strategis dengan beberapa negara di dunia seperti Singapura, China, Korsel, Denmark, dan Jerman, yang memiliki kemitraan strategis dan komprehensif bagi Kota Jambi. Kota Jambi juga tercatat sebagai anggota aktif dalam beberapa organisasi internasional seperti *United Cities and Local Governments Asia Pacific* (UCLG ASPAC) dan *International Council for Local Environmental Initiatives* (ICLEI), (Andriano, 2018).

Sejak tahun 2009, UNESCAP menanggapi krisis limbah Asia Pasifik maupun kepedulian terhadap Limbah di negara mitra, mendorong UNESCAP untuk membangun dan mempromosikan fasilitas limbah ke sumber daya di seluruh Asia Pasifik. Inisiatif sampah ke sumber daya, seperti pembuatan kompos dan produksi biogas, menawarkan cara-cara alternatif untuk mengolah dan membuang limbah. Dimulai pada tahun 2014 UNESCAP mengadakan

UCLG ASPAC menyelenggarakan Loka Karya “*National Workshop on pro-poor and sustainable solid waste management in Secondary cities and small town (Prospects for the Application of Anaerobic Digestion to Treat Municipal Solid Waste Management in Indonesia)*”, di Jakarta. Sebagai hasil loka karya ini, terpilih 4 kandidat untuk menjadi tuan rumah percontohan *Waste To Energy* yang akan mendapatkan dana hibah sebesar satu milyar rupiah untuk pembangunan *Bio Digester* (merubah sampah menjadi energi), salah satu kandidat terpilih yaitu Kota Jambi. Untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan informasi, pada awal setiap proyek UNESCAP dan mitranya melakukan 'Survei Dasar Pengelolaan Limbah' atau *Baseline Survey* yang menilai kondisi lokal kota dan memungkinkan manajer proyek untuk memastikan bahwa kecocokan tercapai antara kebutuhan lokal dan desain fasilitas dan sistem (Arsip Resmi Baseline Survey, UNESCAP).

Survei dasar ini, yang dilakukan pada tahun 2015 untuk Kota Jambi, Indonesia, mengeksplorasi komposisi limbah padat dan laju pembangkitan kota. Ini juga mengeksplorasi sistem pengumpulan limbah di tempat di kota, pada saat penilaian, kebijakan dan institusi yang terlibat, peran sektor informal dan berbagai faktor dan variabel lain. Selain itu, survei dasar menguji peluang untuk mengubah limbah menjadi energi, dan kelayakan fasilitas percontohan limbah menjadi energi (UNESCAP, 2015).

Pergeseran menuju pendekatan limbah ke sumber daya atau *Integrated Resource Recovery Center (IRRC) Waste to Energy* , diperlukan untuk mengatasi peningkatan jumlah sampah yang meningkat pesat di kota-kota di negara berkembang, tidak terkecuali Jambi. Dengan rata-rata fraksi organik limbah padat antara 51-65

persen dan sampah anorganik dapat didaur ulang rata-rata antara 26-33 persen. Melihat besarnya peluang yang ada, menjadi salah satu pendorong dilakukannya kerja sama ini agar sampah organik yang ada dapat dimanfaatkan untuk pemulihan sumber daya (UNESCAP, 2015).

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam tesis ini akan dibahas proses kerja sama yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi dengan *United Nation Economic and Social Commission for Asia and Pasific* (UN ESCAP) dalam hal pengelolaan sampah.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

“Bagaimana proses kerja sama antara Pemerintah Kota Jambi dengan UNESCAP (*United Nations Economic and Social Commision for Asia and the Pacific*) pada tahun 2014-2018?”.

### **C. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada proses kerja sama Pemerintah Kota Jambi dengan UNESCAP “*United Nations Economic and Social Commision for Asia and the Pacific*” Tahun 2014-2019. Pengambilan tahun 2014-2018 karena selama rentang tahun 2014-2018 *Pilot Project Integrated Resource Recovery Center Waste to Energy* berhasil dibuat sebagai hasil dari kerja sama antara pemkot Jambi dengan UNESCAP. Meskipun demikian dalam pembahasan selanjutnya masih memungkinkan peneliti untuk membahas masalah-masalah lain yang relevan dan mendukung pokok permasalahan.

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari Kerja Sama Internasional yang dilakukan

Pemerintah Kota Jambi dengan UNESCAP dalam pengelolaan sampah.

2. Menjawab pokok permasalahan dan menguji hipotesa yang diajukan oleh penulis.
3. Untuk memperkaya kajian ilmu pengetahuan yang selama ini diperoleh di bangku kuliah dan mengaplikasikannya ke dalam suatu fenomena.
4. Mencari temuan baru sehingga penulis dapat mendiskripsikan serta menjelaskan dan memprediksikan fenomena yang ada.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk menjawab Bagaimana proses Kerja Sama Internasional yang Dilakukan Pemerintah Kota Jambi dengan UNESCAP dalam Pengelolaan Sampah. Maka penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian yang membahas mengenai proses kerjasama Pemerintah Kota Jambi dengan UNESCAP “*United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*”.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Stefan Wolff, *Paradiplomacy, Scope, Opportunities and Challenges* yang mana dalam penelitian itu mengatakan bahwa Paradiplomacy mengacu pada kapasitas kebijakan luar negeri entitas sub-negara: partisipasi mereka, independen dari negara metropolitan mereka, di arena internasional dalam mengejar kepentingan internasional khusus mereka sendiri. Dengan demikian, menantang sejumlah teori dari disiplin hubungan internasional yang biasanya tidak menganggap entitas sub-negara sebagai subyek hubungan internasional serta klaim tradisional negara untuk kedaulatan (Wolff, 2007).

Artikel ini digambarkan pada tiga contoh di Eropa Barat bahwa fenomena *paradiplomacy* konsisten dengan teori baik hubungan internasional dan kedaulatan negara bila dilihat melalui lensa resolusi konflik dan otonomi (Wolff, 2007). Penulis masukkan jurnal ini sebagai salah satu tinjauan pustaka karena banyak penjelasan tentang paradiplomasi yang dipaparkan dari sudut lain, yang membuat pengetahuan penulis akan paradiplomasi kian bertambah. Paradiplomasi yang dijelaskan oleh *Stefan Wolff* membuka pemikiran baru bahwa setiap *sub-state* melakukan kerja sama untuk menjalankan kepentingan mereka.

Jim Gallagher pada tahun 2012 memaparkan tentang hubungan antar *sub-states* di *United Kingdom*, dalam jurnalnya yang berjudul “*Intergovernmental Relations in the UK: Co-operation, Competition and Constitutional Change*”. Menurut Gallagher, desentralisasi tidak memberikan dampak yang signifikan bagi otoritas lokal UK dalam pembuatan kebijakan, sehingga terjadi hubungan yang asimetris bahkan *peripheral* antara *Britain* dengan *counties* atau otoritas lokal yang lainnya. Walaupun desentralisasi pada prakteknya terjadi di UK, namun masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa UK merupakan negara yang dapat menjalankan desentralisasi dengan stabil. Masih terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi desentralisasi UK di masa depan, seperti warisan, politik, serta ekonomi (Gallagher, 2012).

Elin Royles (2017) dalam tulisannya yang berjudul *Sub-state diplomacy: Understanding the international opportunity structures*, menyebutkan bahwa peran *sub-state* dalam hubungan luar negeri adalah hal yang kini tidak dapat dipungkiri. Diplomasi *sub-state* yang dalam berbagai ranah kebijakan dapat dipengaruhi oleh struktur yang bervariasi. Dalam studinya mengenai diplomasi Wales di UK,

keberadaan *non-governmental organizations* atau NGO dalam telah berkontribusi dalam menginisiasi adanya diplomasi *sub-state*. (Royles,2017).

Czeslaw Tubilewicz dalam jurnal yang berjudul “*Paradiplomacy as a Provincial State-Building Project*”, telah menganalisa hubungan antara Yunan dengan negara-negara yang tergolong dalam perkumpulan Greater Mekong Subregions atau GMS dalam Asian Development Bank. Menurut Tubilewicz, diplomasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Yunan bukanlah diplomasi yang didasari oleh keinginan otoritas daerah di Yunan untuk mengembangkan diri dan menjadi pelaku atau agensi dalam hubungan luar negeri. Paradiplomasi Yunan merupakan kebijakan yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi dan tujuan untuk memperoleh bantuan ekonomi dari Pemerintah Pusat China (Tubilewicz, 2016).

Menurut Tubilewicz, Pemerintah pusat China tidak melihat kepentingan tersebut sebagai hal yang negatif. Pemerintah China telah menyadari keuntungan dari paradiplomasi sebagai jalan untuk meningkatkan daya saing provinsi-provinsi yang terletak di perbatasan, dalam hal ini Yunan. Walaupun demikian, Pemerintah China tetap menjadi pusat bagi hubungan luar negeri Yunan, melalui pembiayaan, mengeluarkan kebijakan untuk perekonomian Yunan, baik domestik maupun luar negeri, serta menentukan parameter bagi kerjasama Yunan dengan negara-negara lainnya dalam ADB (Tubilewicz, 2016). Dengan kata lain, negara tetap menjadi pemegang kendali, bahkan determinan yang mempengaruhi praktek paradiplomasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Yunan.

Sebagaimana yang ditulis oleh Takdir Ali Mukti, dalam buku “*Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia*”,

menyatakan bahwa hubungan transnasional yang mewarnai sistem interaksi masyarakat dunia pasca regime Westphalia memiliki karakter yang lebih partisipatif bagi semua aktor internasional, baik pada tingkat negara maupun lokal, institusional maupun individual. Hubungan transnasional tidak serta merta menghapuskan sendi utama kedaulatan suatu negara, namun melahirkan sebuah tuntutan untuk pengaturan lebih lanjut tentang komitmen negara untuk melakukan share kedaulatan dalam batas-batas konstitusinya. Kajian pada buku Paradiplomasi ini difokuskan kepada pembahasan 4 aspek, aspek teoritis hubungan internasional, aspek diplomasi, dan dari aspek praktis pembuatan kerjasama internasional.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Takdir Ali Mukti, yang berjudul “Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional”. Takdir Ali Mukti, menyatakan bahwa Paradiplomasi di era otonomi daerah merupakan sebuah penanda perubahan, dari pola pengelolaan pemerintahan daerah yang “*inward looking*” menjadi berorientasi pada “*outward looking*”. Dari kacamata kajian ilmu Hubungan Internasional, paradiplomasi merupakan sebuah gejala bangkitnya aktor-aktor lokal di fora internasional, yang semakin mengarah pada pola hubungan yang transnasional, informal, inklusif dan kompetitif. Disinilah, kalangan pemerintah daerah harus mampu melakukan diplomasi public yang variatif dengan menggunakan jalur-jalur “multi-track diplomacy”, termasuk di dalamnya “cultural diplomacy”. Pensiapan penda terhadap peluang yuridis untuk melakukan paradiplomasi harus didasarkan pada kepentingan daerah yang fundamental, dan bukan sebuah peluang untuk merencanakan perjalanan ke luar negeri bagi para pejabat daerah secara legal dengan menggunakan anggaran daerah.

Tentu, ini butuh sebuah kedewasaan bersikap dan kejujuran para pejabat (Mukti, 2015).

Studi mengenai paradiplomasi nampaknya belum menjadi primadona dalam kajian Hubungan Internasional di Indonesia, walaupun sejatinya internasionalisasi pemerintah daerah telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Buku yang ditulis oleh Takdir Ali Mukti dapat dikatakan sebagai buku pertama di Indonesia yang menjelaskan paradiplomasi secara lugas dan jelas. Walaupun demikian, penulis mencoba untuk memaparkan sejumlah penelitian terdahulu mengenai paradiplomasi di Indonesia.

Studi Stivani Ismawira Sinambela yang berjudul *Kebijakan pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional (Studi Kasus: Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Medan dan Penang)*. Kajian ini berfokus pada kerjasama yang terjalin antara Medan dan Penang. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan mengenai proses pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam pengelolaan kerjasama Internasional dan alasan mengenai kerjasama yang dilakukan belum maksimal. Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan akan hambatan yang dialami oleh Medan dan Penang dalam melakukan kerjasama sehingga dianggap belum maksimal, hambatan yang dihadapi oleh kedua belah kota tersebut adalah dari *External Government Issues* dan *Internal Government Issues* (Sinambela, 2014).

Irni Aprilia Dai dalam penelitiannya yang berjudul *Kerjasama Sister City Surabaya-Kitakyushu Dalam Pengelolaan Limbah Sampah*. Kajian ini berfokus pada kerjasama luar negeri yang dibangun oleh pemerintah daerah Surabaya dan Kitakyushu dalam permasalahan sampah yang ada di Surabaya. Hasil temuan dalam penelitian ini yaitu pembangunan pabrik pengelolaan sampah dan *composting* di Surabaya

serta peluang dan hambatan bagi kerjasama yang terjalin di kedua belah pihak. Ditemukan hambatan eksternal dan internal, seperti proses perbaikan lingkungan hidup dan mendorong sifat kemandirian Surabaya untuk mengelola sampah (Dai, 2017).

Terdapat sejumlah poin yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penulis mencoba untuk menampilkan pola *outward-looking* dalam paradiplomasi yang dilaksanakan oleh Pemda Jambi. Studi yang dilakukan oleh Gallagher dan Royles berfokus kepada hubungan antar *sub-states* dalam sebuah entitas negara (Gallagher, 2012; Royles, 2017), keduanya menunjukkan pola orientasi hubungan antar sub-states yang sangat *inward-looking*. Studi Tubilewicz mengenai paradiplomasi Yunan juga menunjukkan orientasi Yunan yang sangat *inward-looking*, walaupun kerjasama tersebut dilakukan antara Yunan dengan negara anggota GMS dalam sebuah organisasi internasional ADB, namun kepentingan Yunan untuk meningkatkan bantuan pembangunan dari Pemerintah Pusat China.

Kedua, penelitian ini membahas tentang diplomasi antara *sub-state* dengan organisasi internasional sebagai aktornya, yakni UNESCAP dengan Pemkot Jambi. Studi yang dilakukan oleh Sinambela fokus kepada penelitian proses pengambilan kebijakan Pemkot Medan dengan Penang yang keduanya merupakan *sub-states*, serta hambatannya. Studi Dai yang berfokus kepada peluang dan hambatan kerjasama Surabaya, juga menggambarkan hubungan antar *sub-states*, yakni Surabaya dengan Kitakyushu.

Berikut adalah tabel rangkuman yang berisi *literture review* yang penulis gunakan sebagai acuan dalam penulisan ini :

**Tabel 1.2 Tinjauan Pustaka terhadap Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi dengan UN ESCAP**

No	Nama, Tahun Terbit, Institusi dan Judul Penelitian	Temuan
1.	Stefan Wolff (2007). <i>Paradiplomacy, Scope, Opportunities and Challenges,</i>	Paradiplomacy mengacu pada kapasitas kebijakan luar negeri entitas sub-negara: partisipasi mereka, independen dari negara metropolitan mereka, di arena internasional dalam mengejar kepentingan internasional khusus mereka sendiri. Dengan demikian menantang sejumlah teori dari disiplin hubungan internasional, yang biasanya tidak menganggap entitas sub-negara sebagai subyek hubungan internasional, serta klaim tradisional negara untuk kedaulatan.
2.	Jim Gallagher (2012). <i>Intergovernmental Relations in the UK: Co-operation, Competition and Constitutional Change</i>	Menurut Gallagher, desentralisasi tidak memberikan dampak yang signifikan bagi otoritas lokal UK dalam pembuatan kebijakan, sehingga terjadi hubungan yang asimetris bahkan <i>peripheral</i> antara <i>Britain</i> dengan <i>counties</i> atau otoritas lokal yang lainnya
3.	Elin Royles (2017) <i>Sub-state diplomacy: Understanding the international opportunity structures</i>	menyebutkan bahwa peran <i>sub-state</i> dalam hubungan luar negeri adalah hal yang kini tidak dapat dipungkiri. Diplomasi <i>sub-state</i> yang dalam berbagai ranah kebijakan dapat dipengaruhi oleh struktur yang bervariasi. Dalam studinya mengenai diplomasi

		Wales di UK, keberadaan <i>non-governmental organizations</i> atau NGO dalam telah berkontribusi dalam menginisiasi adanya diplomasi <i>sub-state</i> .
4.	Czeslaw Tubilewicz (2016) <i>Paradiplomacy as a Provincial State-Building Project</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- diplomasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Yunan bukanlah diplomasi yang didasari oleh keinginan otoritas daerah di Yunan untuk mengembangkan diri dan menjadi pelaku atau agensi dalam hubungan luar negeri. Paradiplomasi Yunan merupakan kebijakan yang dilandasi oleh kepentingan ekonomi dan tujuan untuk memperoleh bantuan ekonomi dari Pemerintah Pusat China</li> <li>- Walaupun demikian, Pemerintah China tetap menjadi pusat bagi hubungan luar negeri Yunan, melalui pembiayaan, mengeluarkan kebijakan untuk perekonomian Yunan, baik domestik maupun luar negeri, serta menentukan parameter bagi kerjasama Yunan dengan negara-negara lainnya dalam ADB</li> </ul>
5	Takdir Ali Mukti (2015) <i>Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda di Indonesia</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan transnasional tidak serta merta menghapuskan sendi utama kedaulatan suatu negara, namun melahirkan sebuah tuntutan untuk pengaturan lebih lanjut tentang komitmen negara untuk melakukan share kedaulatan dalam batas-batas</li> </ul>

		<p>konstitusinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paradiplomasi di era otonomi daerah merupakan sebuah penanda perubahan, dari pola pengelolaan pemerintahan daerah yang “<i>inward looking</i>” menjadi berorientasi pada “<i>outward looking</i>”</li> </ul>
6	<p>Stivani Ismawira Sinambela (2014), Magister Hubungan Internasional UMY, Kebijakan pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional (Studi Kasus : Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Medan dan Penang)</p>	<p>Kajian ini berfokus pada proses pengambilan kebijakan pemkot Medan dalam pengelolaan kerjasama Internasional dan alasan mengenai kerjasama dilakukan belum maksimal. Penulis menjelaskan akan hambatan yang dialami oleh Medan dan Penang dalam melakukan kerjasama sehingga dianggap belum maksimal, hambatan yang dihadapi oleh kedua kota tersebut adalah dari <i>External Government Issues</i> dan <i>Internal Government Issues</i></p>
7	<p>Irni Aprilia Dai (2017), Magister Hubungan Internasional UMY, Kerjasama Sister City Surabaya-Kitakyushu Dalam Pengelolaan Limbah Sampah.</p>	<p>Kajian ini berfokus pada kerjasama luar negeri yang dibangun oleh pemerintah daerah Surabaya dan Kitakyushu dalam permasalahan sampah yang ada di Surabaya. Hasil temuan dalam penelitian ini yaitu pembangunan pabrik pengelolaan sampah dan <i>composting</i> di Surabaya serta peluang dan hambatan bagi kerjasama yang terjalin di kedua pihak. Ditemukan hambatan eksternal dan internal, seperti proses perbaikan lingkungan hidup dan mendorong sifat kemandirian Surabaya untuk mengelola sampah.</p>

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dipaparkan oleh penelitian-penelitian dan buku-buku di atas, maka dari itu penulis memiliki beberapa perspektif yang sama namun juga ditemukan adanya perbedaan. Penulis mencoba untuk menampilkan pola *outward-looking*, berupa implementasi paradiplomasi yang dilakukan dengan Organisasi Internasional. Dengan adanya perbedaan tesis yang dibuat penulis dengan tesis-tesis sebelumnya, penulis merasa cukup untuk membuat gagasan baru di akhir penelitian ini.

## **F. Kerangka Konseptual**

### **1. Konsep Paradiplomasi**

Konsep yang digunakan dalam tulisan ini adalah konsep Paradiplomasi yang merupakan singkatan dari *parallel diplomacy*, dimana kata “para” terambil dari kata dari bahasa Yunani yang berarti “di samping”, “dekat”, “bersebelahan” atau “berdampingan”. Oleh karenanya konsep tersebut berkaitan dengan diplomasi yang dilakukan oleh aktor-sub-negara yang bisa bertujuan untuk mendukung, melengkapi, memperbaiki, menduplikasi bahkan menantang atau melawan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat. (Tavares, 2016) Paradiplomasi yang dilakukan oleh aktor sub-negara sendiri memiliki tujuan ekonomi, kultural dan politik (Kuznetsov, 2015).

Buku yang ditulis oleh Takdir Ali Mukti (2013), “Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri oleh pemda di Indonesia. Dalam buku ini dijelaskan:

- Paradiplomasi mengacu pada perilaku dan kapasitas untuk melakukan hubungan luar negeri dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas “*sub-state*”, atau pemerintah

regional/pemda dalam rangka kepentingan mereka secara spesifik.

– Jalinan kerja sama pemda dengan pihak asing disadari akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan cepat (Mukti, 2013).

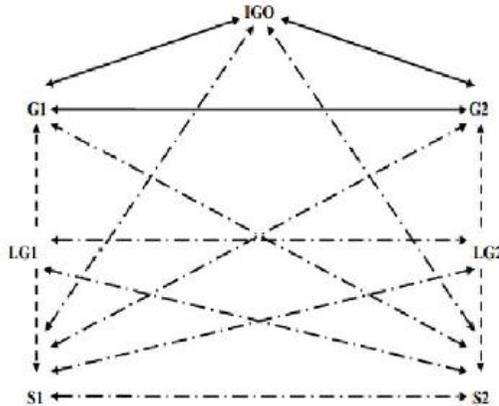
Berdasarkan jurnal yang ditulis Takdir Ali Mukti (2013), “Paradiplomacy, Kerjasama LN oleh pemda di Indonesia”, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kota Jambi sebagai “*sub-state*” atau pemerintah regional yang menjalankan kerja sama Internasional dengan UNESCAP demi menjalankan kepentingan daerah, maka dari itu Pemkot Jambi telah melakukan *parallel diplomacy* atau *Paradiplomacy*. Paradiplomasi yang dilakukan pemerintah Kota Jambi memiliki tujuan untuk mendorong perekonomian daerah (menghemat APBD) sebab hasil dari kerja sama ini “*Pilot Project Integrated Resource Recovery Center Waste to Energy*” juga dapat berguna bagi kesejahteraan masyarakat sekitar, dari segi sosial dan kultural dapat menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan dan mengurangi jumlah sampah organik lalu merubahnya menjadi energi yang lebih bernilai guna dan dari segi politik kerja sama ini dapat menambah kepercayaan maupun eksistensi Pemerintah Kota Jambi di tingkat Internasional agar pihak lain mau berkerja sama dengan Jambi ataupun di Nasional.

Di Indonesia, paradiplomasi didukung dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membahas tentang perubahan kewenangan yang dimiliki sejak memasuki era desentralisasi. Untuk melegalkan peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi di wilayahnya maka pemerintah merumuskan

UU No.32 Tahun 2004 tersebut, yang kemudian direvisi menjadi UU No. 12 Tahun 2008. Seiring perkembangan zaman undang-undang nomor 12 Tahun 2008 direvisi lagi menjadi Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang sampai sekarang masih diterapkan. Ketiga undang-undang tersebut yang mengatur tentang sistem pemerintah daerah. Munculnya aturan tersebut memberikan wewenang kepada sejumlah daerah secara semi-otonom dalam rangka mendorong pembangunan di daerah. Oleh karena itu, melalui otonomi daerah kemandirian dalam menjalankan pembangunan sesuai dengan kapasitas dan kebtuhan daerah diharapkan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien (Fathun, 2016).

Adanya aktor baru dalam pelaksanaan Hubungan Internasional, seperti halnya secara teoritis pemerintah daerah (*local government*) baik tingkat I maupun tingkat II, bisa dikatakan sebagai “aktor baru” dalam studi maupun pelaksanaan Hubungan Internasional. Dari sisi kedaulatan, pemerintah pusat melalui UU nomor 22 dan 25/1999 telah memberikan jalan dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti pembukaan hubungan diplomatik yang telah dijalin dengan pihak luar negeri; dengan kegiatan-kegiatan kerjasama keuangan, kebudayaan, perekonomian dan lain-lain. Dengan catatan, pemerintah daerah hanya boleh melakukan kerja sama dengan negara ataupun pihak luar negeri yang secara resmi telah melakukan hubungan diplomatik dengan pemerintah pusat Indonesia. Munculnya “aktor baru” bernama pemerintah daerah (*local government*) mempengaruhi perkembangan model hubungan yang bersifat transnasional. Hal itu bisa digambarkan sebagai berikut (Jatmika, 2001).

Gambar 1.1 Pola Hubungan Internasional bersifat Transnasional hal mana *Local Government* (Pemeintah Daerah)



merupakan aktor/pelaku “baru” hubungan Internasional; menurut *Sidik Jatmika*

Keterangan :

————— Hubungan politik antar negara

----- Hubungan Politik dalam negeri

- . - . - . - . Hubungan Transnasional

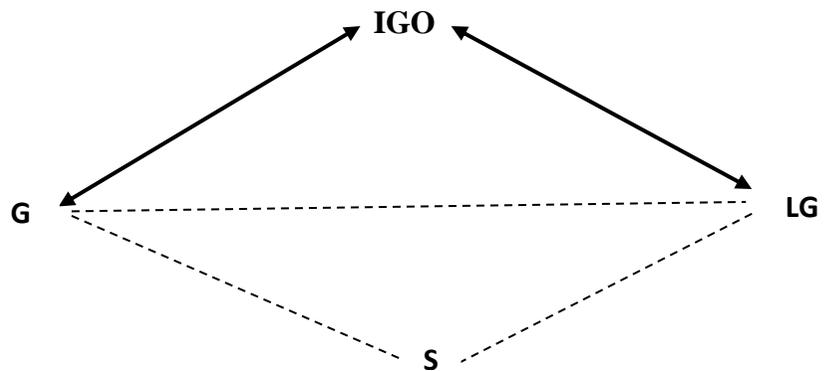
G = *Government* (Pemerintah Pusat)

IGO = *International Government Organization* (Lembaga Internasional)

LG = *Local Government* (Pemerintah Daerah)

S = *Society* (Masyarakat), termasuk di dalamnya masyarakat bisnis

Gambar 1.2 Aplikasi teori Pola Hubungan Internasional yang melibatkan *Local Government* (Pemerintah Daerah), yaitu Pemerintah Kota Jambi dengan lembaga internasional (UNESCAP) menurut kajian penulis.



Keterangan : \_\_\_\_\_ Hubungan politik antar negara  
 -----Hubungan Politik dalam negeri

G = *Government* (Pemerintah Pusat)

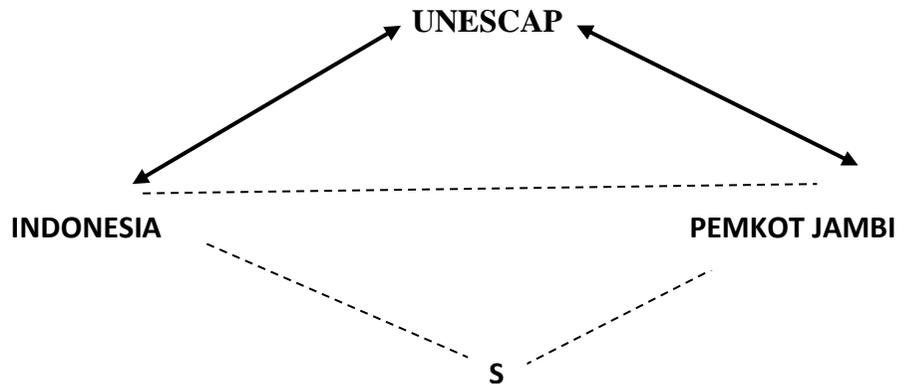
IGO = *International Government Organization*  
 (Lembaga Internasional)

LG = *Local Government* (Pemerintah Daerah)

S = *Society* (Masyarakat)

Berdasarkan skema di atas dapat dinyatakan penulis sebagai berikut :

Gambar 1.3 Aplikasi teori Pola Hubungan Internasional yang melibatkan *Local Government* (Pemerintah Daerah), yaitu Pemerintah Kota Jambi dengan lembaga internasional (UNESCAP)



Keterangan :

\_\_\_\_\_ Hubungan politik antara Indonesia dan UNESCAP

-----Hubungan Politik dalam negeri

UNESCAP = *United Nations Economic and Social Commission*

Indonesia = *Government* (Pemerintah Pusat RI)

PEMKOT JAMBI = *Local Government* (Pemkot Jambi)

S = *Society* (Masyarakat)

Skema di atas dibuat dari hasil kajian penulis berdasarkan Pola Hubungan Internasional bersifat Transnasional munculnya *Local Government* (Pemerintah Daerah) sebagai “aktor baru” hubungan internasional menurut *Sidik Jatmika*. Penulis hanya menyebutkan empat aktor berdasarkan kerja sama yang dikaji dalam tulisan ini yaitu, UNESCAP sebagai IGO, Indonesia sebagai G, Pemkot Jambi sebagai

LG, dan Society. Hilangnya satu aktor yaitu Government, karena kerja sama ini hanya terjadi antara G to IGO bukan G TO G. Hilangnya hubungan transnasional juga dikarenakan Society yang berhubungan adalah masyarakat yang sama dalam satu negara (Indonesia). Maka dari itu, paradiplomasi yang dilakukan dalam hal ini adalah “*Sub-state*” to *International Organization*.

## 2. Konsep *Sustainable Development*

Pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan umat manusia tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.

Konsep pembangunan keberlanjutan mengandung dua dimensi, yaitu : Pertama adalah dimensi waktu karena keberlanjutan tidak lain menyangkut apa yang akan terjadi dimasa yang akan datang. Kedua adalah dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sistem sumber daya alam dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga aspek, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan perlindungan lingkungan. Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena ketiganya menimbulkan hubungan sebab-akibat. Aspek yang satu akan mengakibatkan aspek yang lainnya terpengaruh.

Hubungan antara ekonomi dan sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang adil (*equitable*). Hubungan antara ekonomi dan lingkungan diharapkan dapat terus berjalan (*viable*). Sedangkan hubungan antara sosial dan lingkungan bertujuan agar dapat terus bertahan (*bearable*). Ketiga aspek yaitu, ekonomi, sosial, dan lingkungan akan menciptakan kondisi berkelanjutan (*sustainable*).

Pembangunan kota yang berkelanjutan adalah suatu proses dinamis yang berlangsung secara terus menerus, merupakan respon terhadap tekanan perubahan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Proses dan kebijakannya tidak sama pada setiap kota, tergantung pada kota-kotanya. (Octavia, 2017)

Konsep *sustainable development* dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman. Yaitu :

1. Keberlanjutan ekonomi yang diartikan sebagai pembangunan yang mampu menghasilkan barang dan jasa secara continue untuk memelihara keberadaan lingkungan sekitarnya.
2. Keberlanjutan lingkungan, sistem keberlanjutan secara lingkungan harus mampu memelihara sumber daya yang stabil, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan fungsi penyerapan lingkungan. Konsep ini juga menyangkut pemeliharaan keanekaragaman hayati, stabilitas ruang udara dan fungsi ekosistem lainnya yang tidak termasuk kategori sumber-sumber ekonomi.
3. Keberlanjutan sosial, keberlanjutan secara sosial diartikan sebagai sistem yang mampu mencapai kesetaraan, penyediaan layanan sosial termasuk kesehatan, pendidikan, gender, dan akuntabilitas politik.

Salah satu tantangan terbesar konsep tersebut saat ini adalah menciptakan keberlanjutan, termasuk di dalamnya keberlanjutan sistem politik dan kelembagaan sampai pada strategi, program, dan kebijakan sehingga pembangunan kota berkelanjutan dapat terwujud.

Dengan menggunakan pemahaman konseptual *Sustainable Development, Pilot Project Integrated Resource Recovery Center Waste to Energy* dapat memenuhi kriteria sebagai sebuah program

pembangunan berkelanjutan karena kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan terencana untuk pengelolaan sampah, yang hasilnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas lingkungan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang karena hasil dari *Pilot Project* ini dapat terus diberdayakan sampai waktu yang akan datang, melihat bahwa hasil limbah sampah organik manusia pasti akan terus ada setiap harinya. Manfaat program ini secara *continuitas*, sampah di masa yang akan datang telah memenuhi dimensi pertama sebuah konsep Pembangunan Berkelanjutan. Dimensi kedua dari pembangunan berkelanjutan seperti yang kita ketahui di atas yaitu dimensi interaksi antara sistem ekonomi dan sumber daya alam dan lingkungan, ketiga aspek ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena ketiganya menimbulkan hubungan sebab-akibat.

Aspek yang pertama yaitu keberlanjutan ekonomi. Pembangunan *Pilot Project Integrated Resource Recovery Center Waste to Energy* tersebut mampu menghasilkan energi berupa listrik, gas, dan pupuk organik sebagai hasil dari pengelolaan sampah menjadi energi. Hasil dari listrik, gas dan pupuk organik bisa membantu kehidupan warga sekitar dan pengelolaan sampah ini membuat Dinas Lingkungan Hidup dapat menghemat APBD karena sampah disekitar proyek ini langsung diangkat dan di olah tanpa harus dibawa ke TPA yang jauh. Aspek yang kedua yaitu keberlanjutan lingkungan. Dengan adanya proyek ini tentunya akan baik bagi lingkungan di Kota Jambi. Sampah yang seharusnya ditumpuk di TPA menjadi lebih memiliki nilai guna dan lingkungan pun menjadi bersih dan terjaga. Lalu aspek yang ketiga yaitu keberlanjutan sosial. Dengan adanya proyek ini, masyarakat sekitar dapat menikmati hasilnya langsung dan menerima distribusi hasil olahan *Waste to Energy*, sampah dilingkungan mereka

bersih sehingga kesehatan juga ikut terjaga. Terpenuhinya ketiga aspek tersebut sangat jelas bahwa program ini tentunya menjadi *Sustainable Development* bagi Pemerintah Kota Jambi.

### 3. Konsep Hibah (Academia.edu)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Menteri Keuangan berwenang melakukan Pinjaman Luar Negeri dan/atau menerima Hibah yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Pinjaman Luar Negeri dan hibah tersebut dapat diteruskanpinjamkan dan/atau dihibahkan kepada Pemerintah Daerah dan BUMN.

Pemerintah Daerah dapat meneruskan pinjamkan dan/atau meneruskan hibahkan Pinjaman Luar Negeri kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah yang bersumber dari luar negeri yang diteruskan hibahkan dituangkan dalam Perjanjian Penerusan Hibah yang ditandatangani oleh Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dan gubernur atau bupati/walikota.

Perjanjian Penerusan Hibah atau Perjanjian Pinjaman Hibah paling sedikit memuat:

- a. jumlah;
- b. peruntukan; dan
- c. ketentuan dan persyaratan.

Kementerian Keuangan menyampaikan salinan Perjanjian Penerusan Hibah dan salinan Perjanjian Pinjaman Hibah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan instansi terkait lainnya. Dalam hal Hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan diteruskan hibahkan kepada

Pemerintah Daerah dan/atau dipinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan BUMN, Menteri menyusun dokumen pelaksanaan anggaran.

#### A. KLASIFIKASI HIBAH

Menurut PMK Nomor 191/PMK.05/2011, klasifikasi hibah dapat dibedakan menurut bentuk hibah, mekanisme pencairan hibah, dan sumber hibah.

Berdasarkan sumbernya, hibah dibagi menjadi:

- a. hibah dalam negeri; dan
- b. hibah luar negeri.

Hibah yang bersumber dari dalam negeri berasal dari:

- a. lembaga keuangan dalam negeri;
- b. lembaga non keuangan dalam negeri;
- c. Pemerintah Daerah;
- d. perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia;
- e. lembaga lainnya; dan
- f. perorangan.

Hibah yang bersumber dari luar negeri berasal dari:

- a. negara asing;
- b. lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
- c. lembaga multilateral;
- d. lembaga keuangan asing;
- e. lembaga non keuangan asing;
- f. lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesia; dan

g. perorangan

Hibah dapat digunakan untuk:

- a. mendukung program pembangunan nasional; dan/atau
- b. mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan.

## B. PENGERTIAN HIBAH DAERAH

PP Nomor 2 Tahun 2012, pasal 1, Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

## C. SYARAT HIBAH DAERAH

Syarat hibah daerah menurut Permendagri 32 tahun 2011:

1. Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
2. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
3. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Hibah Daerah meliputi:

- a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
- b. Hibah dari Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011, maka *Pilot Project Integrated Resource Recovery Center Waste to Energy* merupakan suatu pemberian hibah berupa dana sebesar satu milyar untuk pembangunan proyek tersebut yang nantinya tidak perlu dibayar kembali. Termasuk kategori hibah luar negeri, yang bersumber dari lembaga di bawah Perserikatan Bangsa – Bangsa UNESCAP “*United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*”. Hibah ini tentunya mendukung perogram pembangunan nasional dibidang lingkungan menuju Indonesia bebas sampah 2020. Dana Hibah dari UNESCAP “*United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*” berupa *Pilot Project Integrated Resource Recovery Center Waste to Energy* ini juga dapat dikategorikan sebagai sebuah Hibah Daerah menurut Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2012, pasal 1 yang dilakukan pihak lain yaitu UNESCAP dengan persyaratan yang telah dipenuhi sesuai perundang-undangan yang berlaku.

### **G. Hipotesa**

Jawaban sementara yang perlu diverifikasi di pembahasan selanjutnya bahwa proses Kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi dengan UNESCAP “*United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific*” dalam pengelolaan sampah berupa *Pilot Project Propoor and Sustainable Solid Waste Management* (Proyek Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan) adalah sebagai berikut :

Proses kerja sama ini terdiri dari 4 tahap besar :

- Tahap I (2014) dimulai saat UNESCAP memilih Pemerintah Kota Jambi sebagai kota Percontohan dalam *Pilot Project Waste to Energy* melalui penyelenggaraan lokakarya nasional.
- Tahap II (2015) UNESCAP melakukan *Baseline Survey* dan memberikan dana hibah untuk menjalankan *Pilot Project Integrated Resource Recovery Center Waste to Energy* agar Pemerintah Kota Jambi bisa mengolah sampah menjadi energi.
- Tahap III (2015-2018) Pembangunan Pabrik tersebut
- Tahap IV Operasi Pabrik (Pelaksanaan program untuk pemisahan sampah di sumber) serta Monitoring dan pengawasan proyek terus-menerus, agar berguna untuk pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development* dalam ekonomi, lingkungan maupun sosial.

## H. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data-data yang dikumpulkan dari berbagai macam sarana. Penelitian kualitatif berusaha membangun realitas dan memahami realitas tersebut sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas (Deddy, 2001)

### 1. Unit Analisa

Melihat dari objek penelitian yang dianalisa oleh penulis, maka Unit Analisa dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota Jambi berupa DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Jambi.

### 2. Jenis Penelitian

Tulisan ini termasuk jenis penelitian pustaka/kepustakaan (*library research*) yaitu dengan menghimpun data dari perpustakaan maupun internet yang berupa literatur ataupun dokumen tertulis yang dijadikan sumber dan dipergunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang diteliti (Nawawi, 2001)

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Tulisan ini merupakan penelitian yang data-datanya berasal dari sumber sekunder. Menurut Sugiyono, sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2008)

Penulis juga akan melakukan wawancara, yaitu bertemu langsung dengan narasumber maupun via komunikasi lainnya apabila terjadi kendala.

### 4. Teknik Analisis Data

Tulisan ini akan mengaplikasikan kombinasi teknik deduktif-induktif. Deduktif dipakai karena penjelasan berangkat dari kerangka

pemikiran/konseptual atau teori. Kerangka pemikiran/konseptual yang diasumsikan bersifat umum kemudian dijabarkan ke permasalahan yang bersifat khusus dan kontekstual (Mas'oed, 1990). Sedangkan induktif dipakai untuk menyimpulkan atau generalisasi setelah melihat fakta- fakta yang berkaitan dan mendukung kerangka pemikiran/konseptual yang diasumsikan. Kerangka ini yang akan menuntun pengumpulan data yang relevan dan arah pembahasan dalam tulisan ini.

## **I. Sistematika Penulisan**

Bab I membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Tinjauan Pustaka, kerangka pemikiran, hipotesa, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Diharapkan pada bab ini dapat memberikan gambaran mengenai pembahasan yang akan dibahas.

Bab II membahas tentang Kebijakan pemerintah Kota Jambi terhadap permasalahan sampah. Terdapat penjelasan mengenai dinamika Kota Jambi yang selanjutnya akan dipaparkan didalamnya permasalahan sampah di Kota Jambi dan sistem pengelolaan sampahnya. Dilanjutkan dengan penjelasan program lingkungan yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi, serta Perda yang mendukung pengelolaan sampah di Kota Jambi.

Bab III membahas Kerja sama Internasional Pemerintah Kota Jambi terhadap sampah. Dimulai dengan penjelasan Hukum tentang Paradiplomasi, berbagai kerja sama Internasional yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi dan dilanjutkan penjelasan tentang *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)* serta *Pilot Project Integrated Resource Recovery Center (IRRC) Waste to Energy*. Bab ini di akhiri dengan pemaparan syarat pendirian tempat proyek IRRC.

Bab IV ini membahas proses Paradiplomasi yang dilakukan Pemerintah Kota Jambi dengan UNESCAP. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan konsep dan tujuan proyek donor hasil

kerjasama. Dalam Bab ini juga dipaparkan Hambatan dalam kerja sama Pemkot Jambi dengan UNESCAP. Pada bab ini penulis akan menjawab permasalahan yang ada di Rumusan masalah yang telah penulis buat.

Bab V merupakan bab penutup yang akan menyimpulkan dari seluruh uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya.